

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama didirikan sebuah perusahaan pada dasarnya adalah untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang sebesar-besarnya (Idah, 2013; Nofianto & Agustina, 2014; Farraswan, Zulkarnain & Fajri, 2016). Namun di sisi lain untuk menghasilkan keuntungan yang besar tersebut tidak jarang perusahaan mengabaikan kelestarian lingkungan sekitar sehingga kegiatan usaha yang dilakukannya menyebabkan berbagai kerusakan alam, seperti pencemaran udara karena asap pabrik, polusi air akibat limbah industri, pemanasan global, bencana alam, meningkatnya wabah penyakit yang pada akhirnya menyebabkan kualitas kesehatan masyarakat menjadi menurun (Yadav, 2016).

Dunia industri berkontribusi sangat besar terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini, banyak contoh kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia sebagai dampak dari kegiatan industri perusahaan. Di Indonesia kasus semburan lumpur panas Lapindo tahun 2006 telah menyebabkan lumpuhnya perindustrian di Porong Sidoarjo sehingga masyarakat kehilangan mata pencaharian dan juga tempat tinggalnya (Damanik, 2016). Kasus aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Papua telah menimbulkan berbagai masalah bagi lingkungan seperti dampak logam berat yang menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit serta tercemarnya perairan di Sungai Akjwa karena limbah bahan kimia berbahaya

(Pramudya, 2012). Kasus pencemaran perairan juga terjadi di Sungai Citarum sejak berkembangnya industri di Jawa Barat tersebut, setiap harinya pabrik-pabrik memanfaatkan Sungai Citarum untuk membuang limbah bahan beracun berbahaya hasil usaha mereka tanpa diolah terlebih dahulu (Haryanto, 2018).

Selain Indonesia kasus pencemaran lingkungan juga terjadi di Thailand, telah terjadi 200 kasus pencemaran perairan di teluk Thailand dalam 30 tahun terakhir ini. Tahun 2013 Thailand harus menutup Pantai Ao Phra di Ko Samed yang merupakan daerah tujuan wisata di Thailand dikarenakan bocornya saluran pipa PTT Global Chemical dan menumpahkan 50.000 liter minyak mentah ke laut. Hal ini telah mendatangkan banyak kerugian tidak hanya disektor pariwisata, namun tumpahan minyak di perairan teluk Thailand tersebut berdampak pada industri perikanan di mana sebagian besar masyarakat Thailand bergantung pada laut sebagai mata pencaharian mereka (Greenpeace, 2013).

Melihat dampak buruk yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan tersebut pada akhirnya meningkatkan kesadaran dan kekhawatiran masyarakat terhadap peran serta perusahaan dalam menjaga kelestarian alam sehingga menuntut perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar (Janggu, Darus, Zain & Sawani, 2014; Nasir, Ilham & Utara, 2014; Farraswan *et al.*, 2016; Amacha & Dastane, 2017). Perusahaan diharapkan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat bermanfaat bagi semua pihak, tidak hanya berorientasi bagi kepentingan manajemen dan pemilik modal saja, namun juga bermanfaat bagi karyawan, pelanggan dan juga masyarakat sekitar, hal ini didasarkan pada konsep

sustainable development (Aulia & Syam, 2013; Natalia & Wahidahwati, 2016; Caesaria & Basuki, 2017).

Sustainable development atau pembangunan keberlanjutan bermula ketika PBB dalam bidang lingkungan hidup pada tahun 1987 mengeluarkan laporan bernama “ *Our Common Future* “ yang diprakarsai oleh *Brundtland Commission* dalam upaya untuk menghubungkan isu-isu pembangunan ekonomi dan stabilitas lingkungan (Dilling, 2010; Amacha & Dastane, 2017). Laporan ini menitikberatkan bahwa untuk membuat kemajuan menuju pembangunan ekonomi jangka panjang tanpa menghabiskan sumber daya alam atau merusak lingkungan. Laporan ini menyoroti tiga komponen dasar untuk pembangunan keberlanjutan yaitu aspek ekonomi, lingkungan dan sosial (Janggu *et al.*, 2014). Pembangunan keberlanjutan adalah keseimbangan antara *people-planet-profit* atau dikenal juga dengan *Triple Bottom Line* (TBL). Konsep *Triple Bottom Line* ini diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1998, dalam konsep *Triple Bottom Line* mengacu pada bagaimana suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya untuk mencari keuntungan saja namun juga bertanggung jawab terhadap dampak yang diberikan dari kegiatan/aktivitas usaha mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Slapper & Hall, 2011; Sridhar & Jones, 2012; Muallifin & Priyadi, 2016; Amacha & Dastane, 2017).

Sustainable development atau pembangunan keberlanjutan didasarkan pada tiga dimensi yang merupakan pilar penting dari pembangunan keberlanjutan, tiga dimensi itu adalah dimensi ekonomi, dimensi lingkungan dan dimensi sosial (Suttipun, 2015; Yanti & Rasmini, 2015).

Dimensi ekonomi berfokus pada pencapaian keberlanjutan pembangunan ekonomi melalui efisiensi penggunaan modal dan sumber daya, penyediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan individu, peningkatan standar hidup dengan memaksimalkan pengembalian dari produk dan jasa serta pencapaian keadilan ekonomi. Dimensi lingkungan memberikan perlindungan pada ekosistem (darat, air dan udara), pelestarian sumber daya energi, akses ke sumber-sumber daya alam, dan peningkatan kemampuan untuk mengatasi peristiwa dan perubahan lingkungan. Dimensi sosial, dimensi ini mencapai keadilan sosial dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya alam dan ekonomi, interaksi sosial dan partisipasi dalam masyarakat, mengembangkan keanekaragaman budaya serta peduli terhadap hak asasi manusia dan menghormatinya (Aggarwal, 2013; Nofiano & Agustina, 2014; Caesaria & Basuki, 2017; Zyadat, 2017).

Untuk mencapai *sustainable development* ini perusahaan membutuhkan sebuah kerangka yang dapat diukur agar mudah dipahami dan memiliki tujuan yang jelas (Marwati & Yulianti, 2015). Dalam perspektif akuntansi hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan keberlanjutan atau *sustainability report*. Pada dasarnya laporan keberlanjutan merupakan perpanjangan dari *Corporate Social Responsibility* (Kasbun, Teh & Ong, 2016). Laporan keberlanjutan menjadi sarana bagi perusahaan untuk menginformasikan kinerja perusahaan tidak hanya mencakup informasi tentang kinerja keuangan saja tetapi juga informasi non keuangan, yaitu pengungkapan kinerja perusahaan dalam bidang lingkungan dan sosial (Idah, 2013; Susanto & Tarigan, 2013; Farraswan *et al.*, 2016). Sebuah laporan berkelanjutan harus dapat memberikan representasi yang seimbang dan

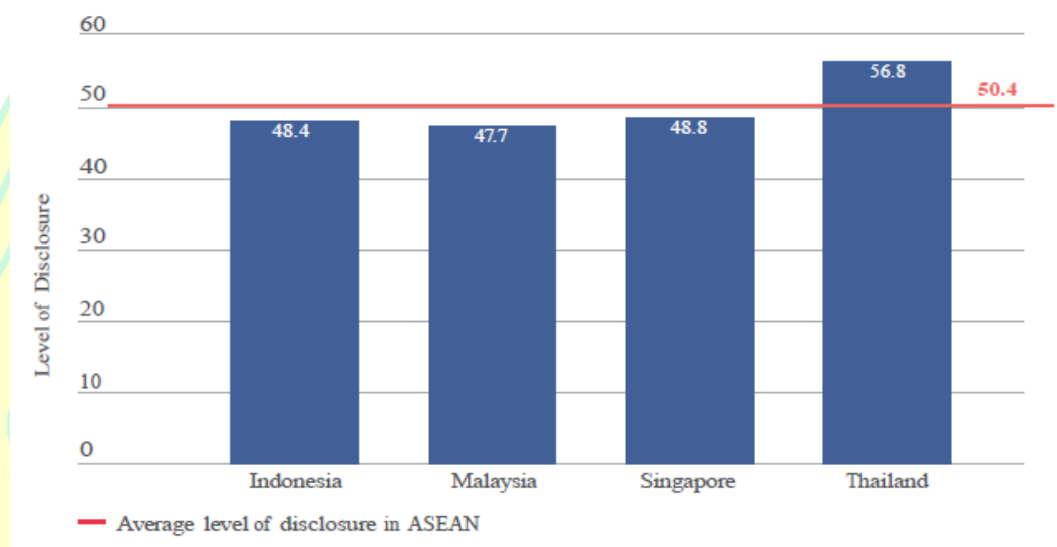
tepat dari kinerja keberlanjutan organisasi pelapor baik kontribusi positif maupun negatif (Kasbun *et al.*, 2016).

Dalam beberapa tahun terakhir ini pelaporan keberlanjutan telah menjadi semakin umum bagi perusahaan di seluruh dunia (Roca & Searcy, 2012; Aktas, Kayalidere & Kargin, 2013; Hsu, Lee & Chao, 2013; Siew, 2015; Kasbun *et al.*, 2016; Mahmud, Biswas & Islam, 2017). Namun tingkat presentase pelaporan keberlanjutan di beberapa negara masih tergolong rendah (Dissanayake, Tilt & Lobo, 2016). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari faktor internal seperti kurangnya kesadaran perusahaan untuk lebih proaktif memberikan kontribusi positif dalam membantu melestarikan lingkungan dan sosial sebagai dampak dari kegiatan industri yang dilakukannya dan juga faktor eksternal seperti belum adanya peraturan dari pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan laporan keberlanjutan atau *sustainability report* di beberapa negara (Idah, 2013; Nasir *et al.*, 2014).

Peraturan pemerintah memiliki peranan penting dalam upaya membangun pelaporan keberlanjutan, karena ketika sebuah perusahaan tunduk pada suatu peraturan, maka dapat membuat perusahaan dikendalikan oleh pemerintah (Wang, Tian, Fan & Luo, 2017). Selain itu tuntutan para pemangku kepentingan juga dapat berubah-ubah sehingga dengan adanya peraturan maka dapat memberikan kepastian bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya (Hansen & Suleiman, 2018).

Pelaporan keberlanjutan saat ini menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan dalam usaha untuk selalu menjaga daya saing dan membuktikan kredibilitasnya di pasar global. Berikut ini tren laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh 4 negara di ASEAN :

ii. Overall Level of Disclosure

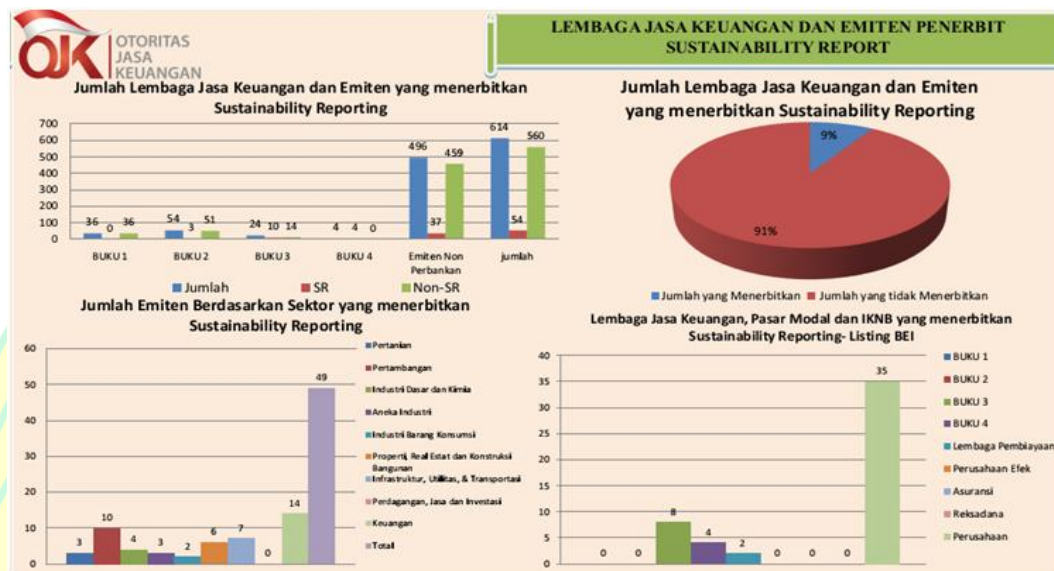


Gambar 1.1 : Tingkat pengungkapan empat Negara ASEAN secara keseluruhan
Sumber : Loh, Thao, Sim, Thomas & Yu (2016)

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Thailand berada pada posisi tertinggi dan merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki tingkat diatas rata-rata untuk pengungkapan laporan keberlanjutan di ASEAN. Kemudian diikuti oleh Singapura Indonesia dan Malaysia.

Penerapan *sustainability report* di Indonesia sudah lama dilakukan hanya saja bersifat *voluntary* atau sukarela (Idah, 2013). Walaupun masih bersifat sukarela sudah terdapat hampir 9% perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan keberlanjutan.

Sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 49 perusahaan listing BEI telah menerbitkan laporan keberlanjutan (OJK, 2017)¹.



Gambar 1.2 : Lembaga jasa keuangan dan emiten penerbit *sustainability report*
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2017)

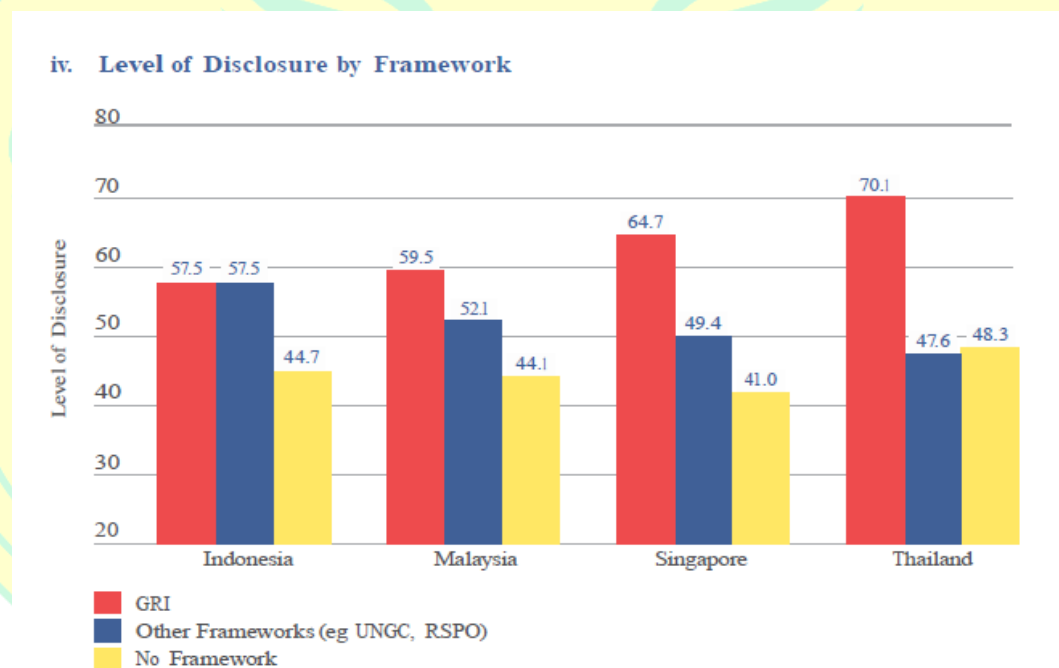
Sustainability report disusun dengan berpedoman kepada *Global Reporting Initiative (GRI)*² yang didirikan pada tahun 1997 dan berlokasi di Amsterdam Belanda. GRI menjadi pedoman yang komprehensif bagi perusahaan untuk menyajikan pelaporan keberlanjutan yakni pengungkapan kinerja perusahaan dibidang ekonomi, lingkungan dan sosial (Karagiorgos, 2010;

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

² *Global Reporting Initiative (GRI)* adalah sebuah organisasi berstandar internasional yang independen untuk membantu pemerintah dan organisasi dalam memahami dan mengkomunikasikan dampak dari kegiatan bisnisnya terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia dan korupsi.

Aggarwal, 2013; Farraswan *et al.*, 2016; Kasbun *et al.*, 2016). Versi terbaru dari GRI adalah GRI 4 yang diluncurkan pada Mei 2013.

Dalam GRI 4 terdapat dua jenis pengungkapan yaitu pengungkapan standar umum yang terdiri atas tujuh aspek mulai dari strategi dan analisis, profil organisasi, aspek material dan *boundary* teridentifikasi, hubungan dengan pemangku kepentingan, profil laporan, tata kelola, etika bisnis dan integritas. Jenis pengungkapan yang kedua adalah pengungkapan khusus, pengungkapan ini terbagi menjadi dua yaitu pengungkapan pendekatan manajemen dan indikator (GRI, 2013)



Gambar 1.3 : Tingkat pengungkapan berdasarkan kerangka kerja
 Sumber : Loh *et al.*, (2016)

Dalam perspektif akuntansi, pengungkapan laporan keberlanjutan dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan faktor-faktor yang menjadikan perusahaan yang satu berbeda dengan perusahaan

lainnya dan menjadi pedoman bagi perusahaan dalam mengambil keputusan (Lang & Lundholm, 1993; Wallace, Naser & Mora, 1994; Kisengo & Kombo, 2014).

Pelaporan keberlanjutan dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan pengungkapan laporan keberlanjutan dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk menunjukkan tingkat kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan guna mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari para pemangku kepentingan. Ketika perusahaan sudah mendapatkan kepercayaan dari para *stakeholder* nya, maka hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan tersebut untuk terus tumbuh dan berkembang, menarik investor untuk peningkatan modal, dan juga loyalitas dari para karyawan-karyawannya. Dengan kinerja yang baik tersebut, maka kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat. Oleh karena itu sangat penting untuk mengukur kualitas dari laporan keberlanjutan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Rudyanto & Siregar, 2018).

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Khafid dan Mulyaningsih (2012) melakukan penelitian pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2013 untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dewan direksi, komite audit, dan *governance committee* terhadap publikasi *sustainability report*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan *governance committee* berpengaruh

secara positif terhadap publikasi *sustainability report*, sedangkan variabel *leverage*, dewan direksi dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap publikasi *sustainability report*. Laurengo dan Branco (2013) dalam penelitiannya mengkaji faktor-faktor yang mendorong tingkat pelaporan keberlanjutan pada perusahaan - perusahaan berkembang yang terdaftar di Bursa Efek Brasil. Variabel yang diteliti yaitu *size*, profitabilitas (*return on equity*), *leverage*, konsentrasi kepemilikan dan status terdaftar di pasar modal asing (*listing status international*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *size*, *return on equity*, status listing internasional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*, sedangkan variabel *leverage* dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Shamil, Shaikh, Ho dan Krishnan (2014) telah melakukan penelitian untuk menguji pengaruh dari karakteristik dewan terhadap publikasi *sustainability report* pada 148 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Colombo (CSE) Sri Lanka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran perusahaan dan kepemimpinan ganda yang memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*, sementara keragaman *gender* atau direksi perempuan dalam perusahaan berpengaruh secara negatif, dewan independensi serta etnis dewan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Marwati dan Yulianti (2015) yang menguji pengaruh profitabilitas (*return on asset*), likuiditas (*current to ratio*), ukuran perusahaan dan *earning per share* (EPS) terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode tahun 2009-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return on asset* berpengaruh positif signifikan terhadap *sustainability report*, *current ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap *sustainability report*, sedangkan *size* dan EPS memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *sustainability report*. Selanjutnya penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *sustainability report* juga dilakukan oleh Branco, Delgado, Gomes dan Eugenio (2014) pada perusahaan-perusahaan di Portugal periode tahun 2008-2011. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, status listing, afiliasi industri, profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap keputusan publikasi *sustainability report*, sedangkan jenis kepemilikan tidak. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Karaman, Kilic dan Uyar (2018) yang melakukan analisa terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan berpedoman pada GRI, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif, status kepemilikan berpengaruh negatif, arus kas bebas, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Choi, Kwak dan Choe (2010) yang meneliti hubungan antara *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan pada 1.222 perusahaan di Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara CSR dengan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, ROE dan Tobins Q. Penelitian yang sama dilakukan oleh Pratiwi dan Sumaryati (2014) yang meneliti mengenai dampak dari pengungkapan *sustainability report* terhadap kinerja keuangan dan kinerja pasar

perusahaan yang terdaftar di indeks SRIKEHATI³ periode tahun 2009-2010. Variabel yang digunakan adalah pengungkapan *sustainability report* dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial, sedangkan kinerja keuangan diukur dengan ROA dan kinerja pasar diukur dengan DER. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan *sustainability report* dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *return on assets*, namun berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko perusahaan yang diukur dengan *debt to equity ratio*. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan *sustainability report* mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari para *stakeholders* sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik berupa ROA yang meningkat. Sedangkan pengaruh *sustainability report* tidak berdampak pada *debt to equity ratio* menunjukkan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan yang sama dengan atau tanpa memanfaatkan pinjaman dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian lainnya dilakukan oleh Nofianto dan Agustina (2014) yang menguji pengaruh dari pengungkapan *sustainability report* dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial, terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *return on asset* (ROA). Periode penelitian tahun 2008-2012 dilakukan pada 19 perusahaan yang terdaftar di NCSR (*National Center For Sustainability Report*)⁴. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan

³ SRIKEHATI merupakan salah satu indeks yang menjadi pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini menggunakan prinsip keberlanjutan, keuangan dan tata kelola yang baik serta kepedulian terhadap lingkungan hidup sebagai tolok ukurnya.

⁴ NCSR (*National Center For Sustainability Report*) merupakan sebuah wadah (Organisasi) non profit yang didirikan pada tanggal 23 Juni 2005 oleh lima organisasi independen terkemuka yaitu Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) serta *Indonesian-Netherlands Association* (INA). Visi dari NCSR ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan penggunaan laporan keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

sustainability report dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap *return on assets*. Kasbun *et al.*, (2016) meneliti dampak dari pelaporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan Perusahaan Publik di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial secara positif terkait dengan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan ROA dan ROE. Penelitian lain yang menguji dampak dari *sustainability report* terhadap kinerja keuangan juga dilakukan oleh Zyadat (2017). Penelitian dilakukan pada dua Bank Syariah di Yordania periode tahun 2008-2014. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara statistik dari dimensi keberlanjutan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan EPS di bank syariah Yordania, namun tidak ada efek signifikan secara statistik dari dimensi keberlanjutan pada kinerja keuangan yang diukur dengan ROE.

Selain itu dalam penelitian ini penulis juga akan meneliti terkait pengaruh peraturan pemerintah sebagai variabel moderasi pengungkapan laporan keberlanjutan dan kinerja keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pedersen, Neergaard, Pedersen dan Gwozdz (2013) yang melakukan analisa bagaimana perusahaan-perusahaan besar di Denmark merespon peraturan baru pemerintah yang mengharuskan setiap perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosial perusahaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan dari pemerintah berdampak pada praktik pengungkapan laporan keberlanjutan. Wang *et al.*, (2017) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh peraturan wajib pelaporan CSR pada perusahaan-perusahaan di Cina periode waktu 2009-2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan wajib pemerintah mengarah pada peningkatan secara keseluruhan dalam kualitas pelaporan CSR. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Hansen dan Suleiman (2018) pada perusahaan keuangan di Swedia dalam merespon peraturan baru yang mewajibkan semua perusahaan besar untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan melihat peraturan baru sebagai cara untuk meningkatkan legitimasi laporan keberlanjutan. Adanya peraturan pemerintah diharapkan dapat mendorong tingkat pengungkapan pelaporan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dengan demikian penggunaan peraturan pemerintah sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hubungan pengungkapan laporan keberlanjutan dan kinerja keuangan.

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas mengenai pengaruh dari karakteristik perusahaan terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report* didapatkan hasil yang berbeda dari masing-masing variabel. Dengan demikian ditemukan adanya *research gap* antara peneliti yang satu dengan peneliti lainnya. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali atas karakteristik perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* ditinjau dari variabel yang telah diteliti sebelumnya dan beberapa faktor tambahan sebagai variabel kontribusi. Dalam penelitian ini penulis juga akan meneliti dampak dari pengungkapan *sustainability report* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun kinerja keuangan diproksikan dengan *capital gain*. Peraturan pemerintah dalam penelitian ini

digunakan sebagai variabel moderasi pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan *research gap* dari penelitian terdahulu maka penulis akan meneliti pengaruh dari karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* dan dampaknya terhadap kinerja keuangan dengan peraturan pemerintah sebagai variabel moderating pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Thailand. Perusahaan non keuangan yang diteliti adalah perusahaan pertambangan dan manufaktur, dikarenakan industri pertambangan dan manufaktur memiliki tingkat sensitivitas terhadap lingkungan yang sangat besar sehingga pengungkapan laporan keberlanjutannya juga sangat tinggi. Negara Thailand dipilih dikarenakan Thailand berada pada posisi tertinggi dan merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki tingkat di atas rata-rata untuk pengungkapan laporan keberlanjutan di ASEAN. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah *size*, *leverage*, likuiditas, aktivitas perusahaan, *capital gain* dan peraturan pemerintah. Variabel aktivitas perusahaan, *capital gain* dan peraturan pemerintah menjadi variabel kontribusi dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2013-2017, karena pedoman GRI 4 mulai dilaksanakan pada tahun 2013.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan beberapa kontribusi diantaranya :

- 1) Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur pelaporan keberlanjutan yang bertujuan mendorong perusahaan – perusahaan di Indonesia dan

Thailand untuk semakin terlibat dalam menciptakan kesadaran dan memahami pentingnya pengungkapan kinerja ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan. Sehingga perusahaan mampu untuk memenuhi tuntutan dari para *stakeholders* untuk dapat membangun suatu pertanggungjawaban terhadap lingkungan dan sosial (Nofianto & Agustina, 2014; Siew, 2015).

- 2) Penelitian ini relevan dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk melakukan tanggung jawab dalam bidang sosial dan lingkungan dengan melakukan pengungkapan *sustainability report* melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017.
- 3) Penelitian ini memberikan wawasan, data dan penjelasan yang lebih luas mengenai pengungkapan *sustainability report* pada dua Negara yang berbeda yaitu Indonesia dan Thailand.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh dari karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* dan dampaknya terhadap kinerja keuangan yang dilakukan oleh (Choi *et al.*, 2010; Khafid & Mulyaningsih, 2012; Laurencio & Branco, 2013; Pedersen *et al.*, 2013; Nofianto & Agustina, 2014; Pratiwi & Sumaryati, 2014; Shamil *et al.*, 2014; Marwati & Yulianti, 2015; Branco *et al.*, 2016; Dissanayake *et al.*, 2016; Kasbun *et al.*, 2016; Muallifin &

Priyadi, 2016; Natalia & Wahidawati, 2016; Amacha & Dastane, 2017; Karaman *et al.*, 2017; Wang *et al.*, 2017; Zyatad, 2017; Hansen & Suleiman, 2018) belum menunjukkan hasil yang konsisten. Berdasarkan adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan ?
- 2) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan ?
- 3) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan ?
- 4) Apakah Aktivitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan ?
- 5) Apakah pengungkapan laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap kinerja keuangan ?
- 6) Apakah peraturan pemerintah memoderasi pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh aktivitas perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan.dengan peraturan pemerintah sebagai variabel moderating

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut :

- 1) Manfaat secara teoritis, penelitian ini untuk menunjukkan pengaruh dari karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Serta menambah referensi literatur yang berkaitan dengan *sustainability report* sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama.
- 2) Manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat :

- a. Bagi Perusahaan, penelitian ini meningkatkan kesadaran perusahaan untuk lebih peduli terhadap pengungkapan *sustainability report* sehingga diharapkan dapat menjadi strategi perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan dari para *stakeholders* dan juga kinerja keuangannya.
- b. Bagi *Stakeholders*, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan yang mengungkapkan informasi kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bagi Investor, sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan aspek-aspek dalam pengambilan keputusan berinvestasi.
- d. Bagi Pemerintah, sebagai bahan acuan untuk menerapkan kebijakan dan mengatur pelaksanaan *sustainability report* bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan Thailand.